



Taklukkan Nomor 1 Dunia, Fajar/Fikri Juara

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri merayakan gelar juara Japan Open 2026 setelah menundukkan pasangan peringkat satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, dua gim langsung 21-19, 21-17 pada final yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Minggu (19/7/2026). Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi ganda putra Indonesia karena menghadirkan satu-satunya gelar Merah Putih di ajang Japan Open sekaligus mengakhiri penantian Indonesia atas gelar turnamen BWF World Tour Super 750 musim 2026. (Dok. PP PBSI)

IRONI KEROPOSNYA INVESTASI DI RI

Dana Pensiun Malaysia RM 200 Juta Boncos di eFishery, Pos Indonesia Gagal Bayar Rp24,11 M

Upaya Indonesia membangun reputasi sebagai tujuan investasi tengah diuji oleh dua peristiwa yang muncul hampir bersamaan pada Juli 2026. Di satu sisi, Kumpulan Wang Persaraan (KWAP), lembaga pengelola dana pensiun pegawai negeri Malaysia, mengungkapkan investasinya sekitar RM200 juta atau US\$47,7 juta di startup akuakultur Indonesia eFishery berpotensi boncos alias rugi besar. Ini setelah terungkap dugaan manipulasi laporan keuangan. Di sisi lain, PT Pos Indonesia (Persero) gagal membayar distribusi periodik Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 senilai Rp24,11 miliar yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026. Buntutnya, Fitch Ratings memangkas peringkat kredit perseroan dari A(idn) menjadi C(idn). Dua peristiwa tersebut memang berasal dari sektor yang berbeda, yakni perusahaan rintisan digital dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun keduanya memperlihatkan benang merah, yakni memicu melemahnya kepercayaan terhadap tata kelola korporasi di negeri ini. Dalam kasus eFishery, pemerintah Negeri Jiran menyatakan investasi telah melalui proses independent due diligence dan penilaian berdasarkan laporan keuangan yang diaudit sebelum dugaan manipulasi terungkap. Sementara pada Pos Indonesia, kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran mencerminkan tekanan likuiditas. Rangkaian peristiwa tersebut menjadi pengingat bila daya saing investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya arus modal yang masuk, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor. BACA HAL 11...

Lini Masa Kasus eFishery (2023 - 2026)



Juli 2023: eFishery meraih pendanaan Seri D USD 200 juta, menjadi unicorn, dan mendapat investasi dari KWAP Malaysia.



Akhir 2024: Investigasi internal dimulai akibat laporan whistleblower mengenai manipulasi laporan keuangan.



April 2025: Hasil investigasi bocor, lalu pendiri Gibran Huzaifah dinonaktifkan dan diperiksa polisi atas dugaan penggelapan.



April 2026: Pengadilan Negeri Bandung resmi memvonis mantan CEO Gibran Huzaifah 9 tahun penjara.

Juli 2026: PM Anwar Ibrahim menjelaskan kerugian ke Parlemen, dan MACC Malaysia mulai menyalahkas kasus demi memulihkan dana KWAP.



KPK TOLAK LAPORAN GRATIFIKASI RAJA JULI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby. Lembaga antirasuah menilai peristiwa tersebut telah masuk dalam penanganan perkara dugaan korupsi yang sedang disidik, sehingga tidak dapat diproses melalui mekanisme pelaporan gratifikasi.

TIMELINE KASUS AMPLOP RAJA JULI ANTONI

- **2 Juni 2026:**
- Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby bertemu Menhut Raja Juli Antoni di Kementerian Kehutanan untuk membahas pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- Selesai pertemuan, Suhardiman meninggalkan amplop putih di dalam map. Raja Juli mengaku tidak mengetahui isinya dan memerintahkan ajudannya mengembalikannya.
- **12 Juni 2026:**
Amplop dikembalikan kepada pihak Suhardiman di Polres Kuantan Singingi. Pengembalian tertunda 10 hari karena alasan agenda dinas.
- **29-30 Juni 2026:**
KPK menggelar OTT terkait dugaan suap jual beli jabatan Sekda Kuansing. Suhardiman sempat tidak ditemukan sebelum akhirnya menyerahkan diri.
- **1 Juli 2026:**
KPK menetapkan Suhardiman, Sekda Zulkarnain, dan pihak swasta sebagai tersangka. Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan korupsi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan.
- **3 Juli 2026:**
Raja Juli melaporkan insiden amplop tersebut ke KPK sebagai laporan penolakan gratifikasi, dengan penjelasan amplop telah dikembalikan sebelum OTT.
- **9-10 Juli 2026:**
KPK mengungkap amplop diduga berisi 12.000 dolar Singapura dan menyita uang tersebut dari Ketua DPRD Kuansing, Juprizal.
- **9-10 Juli 2026:**
KPK mengisyaratkan menolak atau menghentikan proses administratif laporan gratifikasi Raja Juli karena objek laporan berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang disidik.



Menteri Kehutanan
Raja Juli Antoni

aparat penegak hukum.

"KPK menolak pelaporan gratifikasi jika gratifikasi yang dilaporkan sudah masuk dalam ranah pemeriksaan inspektorat, penyelidikan, penyidikan oleh APH," ujar Aminudin.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam proses penyidikan, KPK menemukan informasi mengenai aliran dana yang diterima Suhardiman dari pengurusan alih fungsi kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.

Belakangan, Raja Juli Antoni mengungkapkan Suhardiman sempat memberikan amplop berisi uang dalam mata uang asing saat keduanya bertemu pada awal Juni 2026 di kantor Kementerian Kehutanan. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengaku langsung berupaya mengembalikan amplop tersebut.

Menurut Raja Juli, ajudannya mengembalikan amplop itu kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026, disaksikan Kapolda Jambi, atau sekitar dua pekan sebelum OTT di Kuantan Singingi. Ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke KPK pada 3 Juli 2026. Saat pelaporan dilakukan, amplop beserta isinya sudah tidak lagi berada dalam penguasaannya karena telah dikembalikan kepada pemberi.

Didesak Segera Terbitkan Sprinlidik

Sementara itu, Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai keputusan KPK menolak laporan gratifikasi justru memperkuat urgensi penyelidikan dugaan suap dalam perkara tersebut. Menurut mantan penyidik KPK itu, lembaga antirasuah perlu segera menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik).

"Pertama, KPK harus membuka Sprinlidik atas dugaan suap pada kasus ini. Faktanya telah ada pemberian uang kepada Menteri Raja Juli oleh Bupati Kuansing. Pada sisi lain, pemberian tersebut dilakukan pasca pembahasan kepentingan yang terkait dengan kewenangan Menteri Kehutanan," kata Lakso. Ia berpendapat, penerbitan sprinlidik menjadi bukti keseriusan KPK dalam menindaklanjuti dugaan suap tersebut.

"Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan adalah bukti komitmen serius KPK dalam menindaklanjuti kasus ini," ujarnya. Lakso juga menekankan pentingnya kepastian hukum terhadap status uang yang diberikan kepada Raja Juli Antoni agar polemik yang berkembang tidak terus berlanjut.

"Kedua, kepastian hukum atas status uang itu penting untuk memperjelas kedudukan Raja Juli dalam kasus ini. Tanpa adanya kejelasan atas status uang tersebut maka polemik ini akan terus berlanjut," katanya.

Dalam penyidikan perkara, KPK telah menyita uang yang diduga

berkaitan dengan pemberian kepada Raja Juli Antoni. Barang bukti yang diamankan meliputi 12 ribu dolar Singapura yang disita dari Ketua DPRD Kuansing Juprizal serta Rp15 juta yang disita dari Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuansing Fahdiansyah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik akan mendalami seluruh aspek terkait pemberian amplop tersebut, termasuk asal-usul, tujuan, motif, hingga pihak yang memiliki inisiatif memberikan uang.

"Nah, ini tentu didalami maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa. Semuanya akan didalami oleh penyidik," terang Budi.

KPK juga mengungkap dugaan bahwa uang yang hendak diberikan kepada Raja Juli berasal dari sejumlah sumber, salah satunya pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) milik 914 petani anggota Koperasi Unit Desa (KUD) di Kuantan Singingi.

Dalam konstruksi perkara, Juprizal yang juga menjabat Ketua KUD Prima Sehati diduga berperan membantu pengumpulan dana dari para anggota koperasi. Selain itu, penyidikan turut menelusuri dugaan suap terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.828 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan ditolaknya laporan gratifikasi Raja Juli, KPK menegaskan penanganan dugaan suap tersebut akan dilanjutkan melalui jalur penyidikan perkara pidana korupsi yang sedang berjalan. (gus ist, ini/dya)

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan keputusan itu telah disampaikan langsung kepada Raja Juli Antoni. Menurut dia, penolakan didasarkan pada Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Gratifikasi.

"KPK menolak laporan gratifikasi RJ (Raja Juli Antoni)," kata Aminudin dikutip Minggu (19/7).

Ia menjelaskan, aturan tersebut menyebut laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila objek yang dilaporkan telah menjadi bagian dari pemeriksaan inspektorat maupun proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan oleh

Blunder Hotman di Kasus Mantan Jampidsus Febrie DPR: **TAK ADA ATURAN TANGKAP JAKSA HARUS IZIN PRESIDEN**

Pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang mempertanyakan mengapa Polri tidak meminta izin Presiden Prabowo Subianto sebelum menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka menuai respons dari kalangan DPR. Para Wakil Rakyat menegaskan tidak ada dasar hukum yang mengharuskan aparat penegak hukum memperoleh persetujuan Presiden dalam proses penetapan tersangka maupun penangkapan seorang jaksa.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan pernyataan Hotman tidak memiliki landasan hukum. Menurutnya, prinsip equality before the law berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan maupun status. "Tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa menangkap seorang jaksa itu harus izin Presiden," kata Soedeson di Jakarta, Minggu (19/7).

Soedeson menjelaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang sebelumnya mengatur perlunya izin Jaksa Agung untuk memeriksa atau menangkap jaksa telah kehilangan kekuatan hukum setelah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, proses hukum terhadap jaksa kini mengikuti mekanisme hukum pidana yang berlaku umum.

"Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses sesuai aturan. Tidak penting dia pejabat tinggi atau masyarakat biasa. Semua memiliki kedudukan yang sama di depan hukum," ujarnya.



Pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan, Jakarta, Jumat (17/7/2026) menunjukkan foto-foto kliennya bersama Presiden Prabowo. (ist.dok)

Politikus Partai Golkar itu juga meminta tim penyidik menangani perkara Febrie secara profesional dan transparan mengingat kasus tersebut telah menjadi perhatian publik.

Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto berulang kali

menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda Asta Cita.

"Presiden sudah menegaskan, tegakkan hukum setegak-tegaknyanya. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Jadi tolong jangan

membawa-bawa nama Presiden. Ini masalah penegakan hukum," kata Soedeson.

Gerindra: Prabowo Tak Pernah Campuri Penegakan Hukum

Nada serupa disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Haryadi. Ia menyayangkan pernyataan Hotman yang mengaitkan Presiden Prabowo dengan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah.

Menurut Bambang, Presiden tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum dan justru berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Gerindra menyayangkan statement Hotman Paris yang mengaitkan kasus mantan Jampidsus dengan Presiden Prabowo. Ini sangat tidak benar dan bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi," ujar Bambang, Minggu (19/7).

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI itu menyebut komitmen tersebut telah dibuktikan dengan tidak adanya perlindungan terhadap kader partai maupun pejabat pemerintahan yang berhadapan dengan proses hukum.

"Presiden Prabowo tidak pernah campuri penegakan hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea yang menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah menyebut penetapan tersangka terhadap kliennya dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo.

Dalam konferensi pers di Gedung Bunder Kejaksaan Agung, Jumat (17/7), Hotman menyatakan Febrie merupakan salah satu pejabat yang selama ini mendapat apresiasi Presiden karena dinilai berhasil mengembalikan aset negara melalui penanganan berbagai perkara, termasuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

"Bayangkan orang yang menjadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," ujar Hotman.

Ia bahkan mempertanyakan mengapa Polri berani menetapkan Febrie sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu meminta izin atau berkoordinasi dengan Presiden.

Hotman juga menegaskan dirinya turun langsung menjadi kuasa hukum Febrie karena meyakini kliennya menjadi korban kriminalisasi.

Pernyataan Hotman sebelumnya juga telah mendapat tanggapan dari sejumlah pakar hukum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan yang berlaku. Bahkan, ketentuan yang dahulu mengharuskan adanya izin Jaksa Agung terhadap pemeriksaan jaksa telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. (wid,ist,ini/dya)

Yusril: Kewenangan Penyidik, Kita Awasi Prosesnya

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipap) Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan untuk menahan atau tidak menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Menurutnya, publik perlu mengawasi agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan menjunjung prinsip kepastian hukum.

Yusril menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan mengenai belum ditahannya Febrie Adriansyah meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait PT ASABRI.

Menurut Yusril, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan ruang bagi penyidik untuk menentukan perlu

atau tidaknya melakukan penahanan dengan mempertimbangkan syarat subjektif maupun objektif.

"Penyidik itu punya kewenangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Dan walaupun dilakukan penahanan, dapat juga diuji praperadilan ke pengadilan," kata Yusril usai menghadiri peresmian Cetiya Tian Shi Hua Guan Di Jing Se di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (19/7).

Meski demikian, Yusril menekankan proses penyidikan tetap harus berada dalam pengawasan publik agar berjalan secara profesional dan akuntabel.

"Karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkap atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampidsus kita ini," ujarnya.

Yusril menilai perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan. Oleh karena itu, menurutnya, peluang dilakukan penahanan terhadap Febrie masih terbuka apabila penyidik memandang syarat hukumnya telah terpenuhi.

"Ya karena mungkin masih tahap-tahap awal ya. Kita lihat saja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan," katanya.

Ia menegaskan pemerintah mendukung proses penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, serta menghormati mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koordinasi antarlembaga penegak hukum, kata dia, juga terus dilakukan agar penanganan perkara berjalan sesuai koridor hukum. (wid,ist,kcm/dya)



Semarak Banyuwangi Ethno Carnival

Pagelaran busana etnik tahunan, Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026, kembali hadir di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (18/7/2026). Memasuki gelaran ke-14, BEC 2026 ini mengangkat tema Perang Bayu yang menceritakan perjuangan Rakyat Blambangan melawan kolonialisme. (dok.humasBanyuwangi)

GEMPA M4,9 GUNCANG SUKABUMI, BPBD PANTAU WILAYAH SELATAN

Gempa bumi bermagnitudo 4,9 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (19/7) sore. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada sekitar 83 kilometer di selatan Sukabumi pada koordinat 7,73 Lintang Selatan dan 106,53 Bujur Timur dengan kedalaman 23 kilometer.

Dalam informasi awal, BMKG sempat merilis parameter gempa berkekuatan magnitudo 5,0 dengan pusat gempa sekitar 79 kilometer barat daya Sukabumi. Setelah dilakukan pemutakhiran analisis, magnitudo diperbarui menjadi 4,9.

Gempa yang terjadi di laut itu dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dengan intensitas berbeda. Berdasarkan peta guncangan BMKG, intensitas III MMI dirasakan di Cikotok, Kelapa Nunggal, Cidolog, Cisaat, Simpenan, Kota Sukabumi, dan Nagrak. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah layaknya truk besar yang melintas.

Sementara itu, guncangan berkekuatan II-III MMI juga dirasakan masyarakat di Bayah, Panggarangan, Cimahi, Banjaran, Lembang, serta sejumlah wilayah lain seperti Cianjur, Bandung, dan Bogor.

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga laporan terakhir diterbitkan, belum terdapat laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan

akibat gempa tersebut. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta mewaspadaai kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Pasca gempa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut langsung melakukan pemantauan terhadap wilayah selatan Garut yang berada dalam satu garis pantai dengan Sukabumi.

Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari BMKG terkait gempa tersebut. Namun, berdasarkan hasil pemantauan sementara, wilayah Garut tidak merasakan dampak signifikan.

"Monitoring wilayah Garut tidak terasa," kata Abud Abdullah, Minggu (19/7).

Ia menjelaskan BPBD terus memonitor perkembangan situasi di lapangan sekaligus berkoordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan maupun dampak lain yang dapat muncul.

Abud juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta menghindari bangunan yang mengalami retak atau kerusakan hingga dipastikan aman oleh pihak berwenang.

Sementara itu, BMKG kembali menegaskan hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami sehingga masyarakat di wilayah pesisir tidak perlu melakukan evakuasi, namun tetap diminta mengikuti perkembangan informasi resmi.

KAI Pastikan Aman

Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung memastikan operasional kereta api tetap berjalan aman setelah gempa mengguncang wilayah selatan Sukabumi.

Sebagai langkah antisipasi, KAI menghentikan sementara perjalanan kereta yang melintasi jalur terdampak untuk memastikan seluruh prasarana berada dalam kondisi aman sebelum perjalanan kembali dilanjutkan.

Manager Humas Daop 2 Bandung Kuswardojo mengatakan keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama perusahaan dalam setiap kondisi, termasuk ketika terjadi bencana alam.

"Setiap kali terjadi gempa bumi yang berpotensi mempengaruhi jalur kereta api, KAI akan segera menerapkan prosedur tanggap darurat dengan menghentikan sementara perjalanan kereta pada lintas yang terdampak untuk dilakukan inspeksi oleh petugas prasarana," ujar Kuswardojo.

Menurut dia, getaran gempa dirasakan di wilayah operasional KAI Daop 2 Bandung, khususnya pada lintas Cibeber-Gandasoli. Saat gempa terjadi, KA Siliwangi (343) relasi Cipatat-Sukabumi sedang memasuki Stasiun Cibeber, Kabupaten Cianjur.

"Getaran gempa dirasakan di wilayah operasional PT KAI Daop 2 Bandung lintas Cibeber-Gandasoli, di mana saat kejadian terdapat KA Siliwangi (343) relasi Cipatat-Sukabumi sedang memasuki Stasiun Cibeber-Cianjur," katanya.

Meski kereta tiba di Stasiun Cibeber sesuai jadwal, perjalanan menuju Sukabumi tidak langsung dilanjutkan. Petugas prasarana terlebih dahulu melakukan inspeksi menyeluruh terhadap jalur rel, jembatan, terowongan, wesel, serta fasilitas pendukung operasional lainnya yang berada di lintas terdampak.

Pemeriksaan dilakukan sesuai standar operasional untuk memastikan tidak ada kerusakan pada infrastruktur akibat guncangan gempa. (wid,kum,ist/dya)

UTANG BGN CAPAI RP1,6 T, BELUM BAYAR SERAGAM HINGGA SENDOK

Badan Gizi Nasional (BGN) masih memiliki kewajiban pembayaran atau tunggakan senilai sekitar Rp1,6 triliun yang berasal dari berbagai belanja pada tahun anggaran 2025. Nilai tersebut mencakup pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembayaran jasa event organizer (EO), publikasi, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bantuan pemerintah, hingga pengadaan seragam, call center, dan sendok.

Pemerintah memastikan seluruh kewajiban tersebut akan diselesaikan secara bertahap menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026. Namun, pencairannya masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan review sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, sebagian alokasi anggaran untuk membayar tunggakan tersebut saat ini masih berstatus diblokir. Kendati demikian, pembayaran terhadap tagihan yang telah lolos proses pemeriksaan akan segera dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

"Ini kira-kira nanti tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggarannya masih diblokir, tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan)," kata Agustina dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR, dikutip Minggu (19/7).

Agustina menjelaskan, sebagian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sepanjang 2025 belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang sama. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran tunggakan menggunakan anggaran 2026.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung karena masih harus melewati tahapan pemeriksaan yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tahapan tersebut menjadi syarat sebelum pembayaran dapat diproses oleh Kementerian Keuangan. Karena masih berada dalam tahap review, BGN belum dapat melunasi seluruh tagihan kepada para penyedia barang dan jasa maupun mitra kerja.

"Itu yang menyebabkan kami minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses," ujarnya.



Pencucian ompreng MBG yang dilakukan secara berlapis oleh dapur SPPG Rama Indera 2 Lampung Tengah untuk memastikan higienitas makanan

Permintaan maaf tersebut, kata Agustina, ditujukan kepada seluruh pihak ketiga yang hingga kini masih menunggu pembayaran dari BGN. Ia menegaskan keterlambatan pembayaran bukan karena kewajiban tersebut diabaikan, melainkan karena

harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan rincian yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, tunggakan terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur yang dibiayai

melalui APBN. Nilainya mencapai Rp1,04 triliun, atau sekitar dua pertiga dari total kewajiban yang masih harus dibayarkan. (tin,ist/dya)

Rincian Tunggakan BGN

Belanja modal pembangunan dapur APBN
Rp 1,04 triliun

Jasa lainnya, termasuk EO, publikasi, dan layanan pendukung
Rp 330 miliar

Belanja sertifikasi SPPG
Rp 111,63 miliar

Bantuan pemerintah Program MBG
Rp 100,64 miliar

Belanja bahan untuk pengadaan seragam, call center, sendok, dan kebutuhan lainnya
Rp 16,12 miliar

Utang kepada Universitas Pertahanan (Unhan)
Rp 7,39 miliar

Honor narasumber:
Rp 812,96 juta

Perjalanan dinas
Rp 684,39 juta

Jasa konsultan:
Rp 200 juta

Sewa kendaraan insidentri
Rp 121,95 juta

Evaluasi Insentif Rp6 Juta per Hari

BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah mengevaluasi skema pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang diterapkan pada kepemimpinan sebelumnya itu dinilai perlu dibenahi karena dianggap belum mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maupun rasa keadilan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan evaluasi dilakukan setelah pihaknya mengkaji kembali mekanisme pemberian insentif kepada mitra penyelenggara MBG. Menurut dia, skema yang berlaku selama ini menetapkan insentif diberikan selama 313 hari dalam setahun kepada setiap SPPG.

Perhitungan tersebut berasal dari jumlah hari dalam satu tahun, yakni 365 hari, yang hanya dikurangi hari Minggu sebanyak 52 hari. Dengan demikian, insentif tetap

dibayarkan pada hari libur nasional, hari raya keagamaan, maupun masa libur sekolah ketika distribusi makanan kepada peserta didik tidak berlangsung.

"Dari 365 hari dikurangi 52 hari Minggu dalam setahun. Artinya, mau Natal, mau Lebaran, mau libur sekolah, mau Iduladha, tetap diberikan. Ini secara substansi rasanya pada common sense kita tidak pas," kata Agustina dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, dikutip Minggu (19/7/2026).

Menurut Agustina, hasil evaluasi internal menunjukkan skema tersebut perlu disempurnakan agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih tepat sasaran. Karena itu, jajaran pimpinan BGN saat ini sedang melakukan pembenahan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG, termasuk pola pemberian insentif kepada dapur pelaksana.

"Sekarang kami dalam posisi untuk yuk kita benahi," ujarnya.

Meski melakukan evaluasi, Agustina menegaskan pihaknya tetap menghormati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan BGN sebelumnya. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kebijakan kelembagaan yang diambil sesuai kondisi pada saat itu.

Namun demikian, seiring perubahan kepemimpinan dan upaya memperkuat tata kelola program, seluruh kebijakan kini ditinjau kembali agar lebih selaras dengan prinsip good governance, efisiensi, dan keadilan. (tin,ist/kum)

Jalan Tembus Griyashanta Tetap Diuji Coba Meski Digugat



Jalan baru tembusan Griyashanta- Candi Panggung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan tetap akan melakukan uji coba fungsional jalan tembus yang menghubungkan kawasan Griyashanta dengan Jalan Candi Panggung, Kecamatan Lowokwaru meski digugat warga. Diketahui, sebagian warga RW 12 Kelurahan Mojolangu menempuh upaya hukum berupa kasasi atas proyek itu.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Suparno, mengatakan uji coba akan dilaksanakan setelah seluruh perlengkapan jalan selesai dipasang.

"Terlepas dari kondisi eksisting di lapangan yang sudah bagus, ini merupakan program pemerintah yang sejak lama sudah tertuang di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bahkan pada perubahan perda beberapa tahun

lalu juga sudah ditetapkan sebagai rencana jalan untuk mengurangi beban lalu lintas," ujarnya, dikutip pada Minggu (19/7/2026).

Suparno menjelaskan, pelaksanaan proyek jalan tembus tersebut sempat tertunda karena adanya gugatan yang diajukan Ketua RW 12 Kelurahan Mojolangu bersama

sejumlah warga sejak akhir 2025 lalu. Saat itu, Pemkot Malang memilih menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Namun, menurutnya gugatan tersebut telah diputus melalui putusan sela yang menyatakan para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa.

"Putusannya menyatakan penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan kepada Pemkot Malang karena jalan tersebut pada kenyataannya sudah menjadi aset Pemkot Malang," katanya.

Suparno mengatakan, putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada 9 Juli 2026. Sementara itu, laporan yang diajukan ke Ombudsman RI juga tidak diterima karena proyek tersebut dinilai berkaitan dengan kepentingan umum.

"Jalan itu juga tidak mengambil tanah privat warga. Itu merupakan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang kepada Pemkot," tegasnya.

Meski proses kasasi masih ditempuh sebagian warga, Suparno menegaskan hal itu tidak menghalangi rencana Pemkot untuk mulai memfungsikan jalan tembus tersebut. Menurutnya, pemerintah tetap menghormati proses hukum yang berjalan, namun juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam upaya mengurangi kemacetan.

Lebih lanjut, selama masa uji coba, jalan tersebut belum akan dioperasikan selama 24 jam. Pemkot Malang juga telah menyiapkan langkah antisipasi melalui koordinasi dengan aparat kewilayahan apabila terjadi penolakan saat pelaksanaan uji coba.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan jalan tembus tersebut memiliki panjang sekitar 800 meter dengan lebar sekitar 9 meter yang menghubungkan kawasan Griyashanta dengan Jalan Candi Panggung hingga Simpang Candi Panggung. (Santi/Dya)

Pemkab Malang Prioritaskan Revitalisasi 3 Pasar Tradisional di 2027

MALANG - Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memprioritaskan revitalisasi 3 pasar tradisional. Pasar Turen, Wajak dan Pasar Pakis dipilih karena kondisi bangunannya membutuhkan penanganan menyeluruh.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPK) Kabupaten Malang Farid Habibah mengatakan, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam tahap perhitungan. Selain itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada APBN 2027.

"Untuk sementara, yang akan direvitalisasi itu Pasar Turen, Pasar Wajak, dan Pasar Pakis. Dijatah berapa, ya nanti melihat kecukupan anggaran," ujar Habibah, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, rencana revitalisasi Pasar Turen menjadi perhatian setelah tempat pembuangan sementara (TPS) di area pasar tersebut terbakar pada Senin (13/7/2026) malam. Insiden itu tidak hanya menghanguskan fasilitas TPS, tetapi juga membakar satu kios milik pedagang.

Sebagai solusi jangka panjang,

Pemkab Malang berencana memindahkan lokasi TPS sekaligus membangun ulang deretan kios di sekitar titik kebakaran. Pekerjaan konstruksi nantinya akan ditangani DPKPK.

"Rencananya nanti akan dilakukan pembangunan dua lapak pasar. Lapak kanan dan kiri akan disesuaikan dengan hanggar," kata Habibah.

Dua area lapak tersebut masing-masing terdiri atas puluhan kios. Secara keseluruhan, sekitar 70 kios akan direvitalisasi menjadi bangunan yang lebih layak dan modern. "Perbaikan akan dilaksanakan secara keseluruhan. Baik konstruksi atap, tiang, maupun lantainya," imbuhnya.

Menurut Habibah, pembangunan ulang menjadi pilihan yang paling tepat mengingat kondisi bangunan kios di Pasar Turen sudah mengalami penurunan kualitas. Tiang penyangga mulai lapuk, sementara sebagian lantai masih berupa tanah sehingga berpotensi licin dan membahayakan pedagang maupun pengunjung saat hujan.

Tak hanya Pasar Turen, sejumlah

pasar tradisional lain di Kabupaten Malang juga menghadapi persoalan serupa. Salah satunya Pasar Pakis. Meski sempat memperoleh perbaikan pada 2024, pekerjaan saat itu hanya mencakup penggantian atap dan talang sehingga belum menyentuh perbaikan struktur bangunan secara menyeluruh.

Habibah mengakui, kebutuhan revitalisasi pasar di Kabupaten Malang sebenarnya cukup besar. Akan tetapi, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah selama ini hanya mampu melakukan pemeliharaan ringan.

Sebagai gambaran, pada 2025 lalu Pemkab Malang hanya mengalokasikan anggaran Rp1 miliar melalui APBD untuk pemeliharaan 2 pasar, yakni Pasar Dampit dan Pasar Kepanjen. Masing-masing pasar memperoleh alokasi Rp500 juta.

Berdasarkan data Layanan



Pasar Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. (foto: Prokopim Kab. Malang)

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, pekerjaan tersebut hanya mencakup pemeliharaan minor berupa pekerjaan persiapan, perbaikan atap, sanitasi, dan pengecatan.

Melihat kondisi sejumlah pasar yang mulai menua, Habibah mengakui revitalisasi menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih aman, nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas publik bagi pedagang maupun masyarakat. (Santi/Dya)

Gelombang serangan masif ini memicu respons pertahanan udara besar-besaran, merusak infrastruktur kritis, serta menggeser dinamika konfrontasi militer ke babak baru yang melibatkan target ekonomi domestik di kedua belah pihak.

Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengonfirmasi bahwa Moskow meluncurkan sekitar empat lusin (48 unit) rudal balistik dalam satu gelombang serangan udara brutal. Karakteristik rudal balistik yang memiliki kecepatan tinggi dan waktu respons yang sangat singkat menempatkan sistem proteksi pertahanan sipil dalam ujian terpacitnya.

Melalui platform X, Sybiha menegaskan Rusia melepaskan jumlah rudal balistik terbesar sejak awal perang dalam serangan teroris brutal di ibu kota Ukraina, dan menekankan bahwa mereka membutuhkan tekanan dahsyat pada Moskow untuk mengakhiri teror ini.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melaporkan bahwa serangan semalam tersebut merenggut sedikitnya satu nyawa warga sipil dan melukai 16 orang lainnya di ibu kota dan wilayah sekitarnya. Kerusakan material dilaporkan terjadi di beberapa distrik pemukiman, termasuk kompleks apartemen yang runtuh.

Zelenskyy kembali menyerukan melalui akun mediana bahwa perlindungan terhadap rudal balistik adalah prioritas utama dan konstan bagi Ukraina saat ini. Ia menambahkan bahwa pencegah dibutuhkan setiap hari, dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang menganggap serius perjanjian serta memastikan pengiriman kemampuan anti-balistik untuk negaranya.

"Perlindungan terhadap rudal balistik adalah prioritas utama dan konstan kami saat ini. Pencegah dibutuhkan setiap hari, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang menganggap serius perjanjian kami dan memastikan pengiriman kemampuan anti-balistik," dijutip Minggu (19/7).

Dikutip dari Anadolu Agency, Zelensky menyebut Rusia telah meluncurkan salah satu serangan rudal balistik terbesar terhadap Kyiv. Ia mengatakan lebih dari 40 rudal ditembakkan, dengan sebagian besar mengarah ke ibu kota, disertai 120 drone serang.

Zelenskyy juga menyebut selama sepekan terakhir Rusia menggunakan sekitar 1.450 drone serang, lebih dari 1.640 bom udara berpemandu, serta 99 rudal berbagai jenis untuk menyerang wilayah Ukraina.

Ia menegaskan kemampuan menghadapi rudal balistik menjadi prioritas utama Ukraina dan menyerukan agar tekanan terhadap Rusia terus berlanjut seiring penguatan sistem pertahanan.

Angkatan Udara Ukraina

RUSIA SERANG KYIV DENGAN RUDAL BALISTIK TERBESAR SEJAK INVASI

Memasuki tahun kelima sejak invasi skala penuh bergulir, eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina kembali mencapai titik didih tertinggi. Dalam sebuah operasi udara terkoordinasi, Sabtu (18/7) Kremlin melepaskan apa yang disebut oleh otoritas Kyiv sebagai rentetan rudal balistik terbesar yang menasar ibu kota Ukraina sejak awal perang. Sedikitnya satu orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan.

mengklaim berhasil mencegat 18 rudal dan 108 drone dalam serangan semalam tersebut.

Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan pasukannya menyerang dua kapal tanker Rusia di Laut Hitam, sebuah derek terapung di Laut Azov, sistem pertahanan udara Buk di wilayah Zaporizhzhia yang dikuasai Rusia, serta sebuah jembatan di wilayah Donetsk yang juga berada di bawah kendali Rusia. Menurut militer Ukraina, sasaran tersebut digunakan untuk mendukung logistik dan pasokan bahan bakar militer Rusia.

Di sisi lain, Gubernur Stavropol Vladimir Vladimirov mengatakan sebuah lokasi industri di wilayah Stavropol, Rusia, mengalami kebakaran setelah serangan semalam. Ia menyebut lokasi tersebut berada jauh dari kawasan permukiman sehingga tidak mengancam warga.

Incar Pusat Militer dan Logistik

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia melalui kantor berita Interfax berargumen bahwa pasukan mereka meluncurkan serangan besar-besaran terhadap apa yang digambarkan sebagai pusat militer dan logistik di Kyiv dan sekitarnya. Serta pelabuhan Pivdennyi di wilayah Laut Hitam Odesa.

Pabrik-pabrik di ibu kota Ukraina yang memproduksi komponen untuk rudal menjadi sasaran utama, dibarengi dengan klaim bahwa pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh 140 drone Ukraina semalam.

Serangan rudal Rusia ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Analisis intelijen menunjukkan adanya pola pembalasan setelah pasukan Ukraina melancarkan serangan berturut-turut pada hari-hari sebelumnya.

Pada Sabtu malam, pesawat nirawak Ukraina menghantam gudang logistik raksasa yang dioperasikan oleh salah satu platform pasar e-commerce terbesar di Rusia. Otoritas Rusia melaporkan setidaknya tujuh orang tewas di wilayah Tambov, tenggara Moskow.

Sementara itu, insiden terpisah di fasilitas logistik kedua di wilayah Moskow menyebabkan 40 pekerja harus dirawat di rumah sakit dan klinik setempat menurut data pejabat kementerian kesehatan Rusia via Interfax.

Di samping pertempuran udara, front baru juga memanasi di maritim. Staf Umum Ukraina mengumumkan keberhasilan unit mereka dalam menghantam dua kapal tanker minyak komersial Rusia yang tengah beroperasi di kawasan Laut Hitam. Kapal-kapal tersebut diidentifikasi membawa minyak mentah dan produk turunan minyak bumi untuk suplai militer Rusia.

Serangan ini memperparah krisis bahan bakar maritim yang telah membayangi armada komersial Rusia sejak awal Juli, menyusul serangan serupa pada kilang strategis Saratov sebelumnya.

Eskalasi pertempuran yang intensif ini bertepatan dengan dinamika politik yang krusial di Washington dan Brussels. Tekanan

ekonomi internasional terus digulirkan melalui kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Sanksi Rusia di Kongres AS yang menargetkan pembeli migas internasional dari Kremlin.

Langkah legislatif ini mendapat dorongan politik kuat, termasuk dari lingkaran Donald Trump yang mulai mendukung pembatasan keras migas Moskow, sekaligus memberikan lampu hijau bagi Ukraina untuk memproduksi mandiri komponen rudal sistem Patriot guna menjamin pertahanan jangka panjang. (gus,ist,ana/dya)

PERBANDINGAN KLAIM UKRAINA VS RUSIA

Rudal & Sasaran

- **Ukraina:** Rusia meluncurkan 48 rudal balistik ke Kyiv.
- **Rusia:** Klaim menghantam pusat militer, logistik, dan pabrik rudal di Kyiv-Odesa.

Rudal Dicegat

- **Ukraina:** 18 rudal Rusia berhasil ditembak jatuh.
- **Rusia:** Tidak mengungkap jumlah rudal yang dicegat Ukraina.

Serangan Drone

- **Ukraina:** Menembak jatuh 108 drone Rusia.
- **Rusia:** Mengklaim menjatuhkan 140 drone Ukraina.

Korban

- **Ukraina:** 1 tewas, 16 luka di Kyiv.
- **Rusia:** 7 tewas, 40 dirawat di Tambov akibat serangan Ukraina.



Mengapa **Autoimun** Lebih Banyak Menyerang Perempuan

Bagi banyak perempuan, rasa lelah pada akhir hari sering kali dianggap sebagai konsekuensi dari padatnya aktivitas. Namun, kelelahan yang berlangsung terus-menerus meski sudah beristirahat, disertai nyeri sendi, demam ringan yang berulang, atau keluhan lain yang tidak kunjung membaik, dapat menjadi tanda adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh.

Salah satu kondisi yang perlu diwaspadai adalah penyakit autoimun. Penyakit ini bukan lagi tergolong kasus yang jarang ditemukan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penderitanya terus meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Secara global, sekitar 80 persen penderita autoimun adalah perempuan.

Autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi dari infeksi justru keliru mengenali sel-sel sehat sebagai ancaman. Akibatnya, sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri sehingga menimbulkan peradangan kronis dan, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan organ.

Faktor Genetik dan Hormon

Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof. Ronny Rachman Noor, menjelaskan bahwa tingginya angka autoimun pada perempuan berkaitan dengan kombinasi faktor genetik, hormonal, dan lingkungan.

Secara biologis, perempuan memiliki dua kromosom X yang

membawa lebih banyak gen yang berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut membuat respons imun perempuan cenderung lebih kuat dibandingkan laki-laki. Di satu sisi, hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap infeksi. Namun, di sisi lain, respons imun yang lebih aktif juga meningkatkan risiko terjadinya gangguan autoimun.

Kerentanan tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor lingkungan, seperti infeksi virus, paparan polusi udara, maupun stres berkepanjangan. Faktor-faktor tersebut dapat memicu perubahan epigenetik, termasuk perubahan metilasi DNA yang memengaruhi aktif atau tidaknya gen tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan munculnya penyakit autoimun.

Stres dan Faktor Pemicu

Pada individu yang memiliki predisposisi genetik, kekambuhan atau flare dapat dipicu oleh berbagai faktor. Paparan sinar ultraviolet dalam intensitas tinggi, infeksi, maupun tekanan psikologis yang berkepanjangan merupakan beberapa pemicu yang telah dikenal dalam berbagai penelitian.

Penyakit autoimun memiliki lebih dari 100 jenis dengan gejala dan organ sasaran yang berbeda. Penyakit ini dapat menyerang kulit, seperti psoriasis, vitiligo, dan skleroderma; saluran pencernaan, seperti penyakit Crohn dan celiac; maupun sistem

endokrin, seperti diabetes melitus tipe 1, penyakit Hashimoto, dan Graves.

Pada kondisi tertentu, autoimun juga dapat menyerang sendi, otot, hingga sistem saraf. Beberapa penyakit yang cukup dikenal antara lain lupus, rheumatoid arthritis, myasthenia gravis, dan multiple sclerosis. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit-penyakit tersebut dapat menurunkan kualitas hidup dan kemampuan beraktivitas penderitanya.

Pentingnya Deteksi Dini

Meski faktor genetik tidak dapat diubah, risiko komplikasi akibat autoimun dapat ditekan melalui deteksi dan penanganan sejak dini. Karena itu, gejala yang muncul secara berulang dan tidak dapat dijelaskan sebaiknya tidak diabaikan. Konsultasi dengan dokter, termasuk dokter spesialis reumatologi atau imunologi, diperlukan untuk memastikan diagnosis dan menentukan terapi yang sesuai.

Penanganan autoimun umumnya dilakukan melalui pemberian obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), kortikosteroid, maupun obat imunomodulator sesuai kondisi pasien. Selain terapi medis, perubahan gaya hidup juga berperan penting dalam mengendalikan penyakit.

Pola makan bergizi seimbang, pengelolaan stres, tidur yang cukup, aktivitas fisik yang sesuai, serta menghindari paparan asap rokok merupakan bagian dari upaya menjaga kestabilan sistem kekebalan tubuh.

Meningkatnya kasus autoimun pada perempuan menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh infeksi, tetapi juga oleh keseimbangan sistem imun yang dipengaruhi faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Mengenali gejala sejak dini serta memperoleh penanganan yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan organ dan mempertahankan kualitas hidup. (farist/dya)

Data mengenai epidemiologi penyakit autoimun.

1. Global Burden of Disease (GBD) 2019 & 2021

Sumber: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), dipublikasikan di jurnal The Lancet dan Lancet Rheumatology

Menunjukkan jumlah penderita RA dunia sekitar 18 juta orang pada 2019 dan diproyeksikan meningkat menjadi 31,7 juta pada 2050.

2. World Health Organization (WHO) WHO menerbitkan Fact Sheet Rheumatoid Arthritis yang merangkum data GBD.

Data penting:
-18 juta penderita rheumatoid arthritis pada 2019.
-70% penderita RA adalah perempuan.
-55% berusia di atas 55 tahun.
-Sekitar 13 juta penderita memerlukan layanan rehabilitasi.

China Dekati Ambisi Menyalakan Matahari Buatan



Ambisi umat manusia untuk menjinakkan energi bintang kini bukan lagi sekadar narasi fiksi ilmiah yang jauh dari kenyataan. China terus melesat memimpin perlombaan global dalam mewujudkan reaktor fusi nuklir komersial yang mereka gadang-gadang sebagai 'matahari buatan'. Target besar pun kini terpampang nyata di depan mata: memproduksi

aliran listrik pertama dari reaktor fusi pada tahun 2030. Melalui proyek ambisius Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), lembaga riset negara tersebut baru saja menuntaskan tonggak sejarah krusial setelah dua magnet superkonduktor buatan dalam negeri berhasil lulus uji teknis dan uji beban penuh. Keberhasilan ini tidak sekadar membuktikan lompatan rekayasa

teknik lokal, melainkan juga memicu pergeseran geopolitik teknologi energi bersih global secara masif.

Keberhasilan uji beban penuh pada komponen inti tersebut sekaligus menandai lokalisasi total dari seluruh teknologi utama penyusun proyek matahari buatan. Enam tahun lalu, Institute of Plasma Physics di bawah naungan Chinese Academy of Sciences (ASIPP)

menerima mandat berat dengan dua target utama yang sangat menantang: melompati performa reaktor dan memangkas biaya produksi serendah mungkin.

Para ilmuwan setempat tidak hanya berhasil membangun rantai pasokan domestik yang mandiri, tetapi juga meruntuhkan harga material superkonduktor secara drastis dari 400 yuan menjadi hanya 100 yuan per meter. Langkah efisiensi biaya ini meretas jalan bagi komersialisasi energi fusi yang selama ini dinilai terlampaui mahal dan membakar anggaran negara secara masif.

Secara teknis, lompatan kapasitas reaktor baru ini terletak pada skala dan volume penyimpanan energi yang masif. Para insinyur China berhasil menaikkan bobot satu kumparan magnet superkonduktor secara radikal dari 350 ton menjadi 580 ton.

Peningkatan bobot dan dimensi ini otomatis memberikan ruang bagi reaktor untuk beroperasi pada tingkat energi dan tekanan plasma yang jauh lebih tinggi.

Kendati demikian, otoritas peneliti mengingatkan publik bahwa pencapaian ini baru mencakup 80 persen dari keseluruhan peta jalan proyek.

Tantangan raksasa berikutnya kini menanti di depan mata, yakni menguji stabilitas jangka panjang dan masa pakai kumparan superkonduktor tersebut di bawah siklus operasi ekstrem bertekanan tinggi.

Akselerasi China dalam merajai teknologi fusi nuklir komersial memang terus mencetak rekor yang mencengangkan dunia internasional.

Pada Januari 2025, reaktor EAST berhasil mempertahankan kestabilan suhu plasma sebesar 100 juta derajat Celsius selama 1.066 detik.

Di tengah skeptisisme global mengenai tingkat kerumitan teknologi fusi, para ilmuwan meyakini bahwa secercah cahaya di ujung terowongan kini mulai benderang. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTHIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG: SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO: IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Seni Tampil Standout dengan Outfit Serba Hitam

Warna hitam sering kali menjadi pilihan utama dalam berbusana karena sifatnya yang aman, netral, dan memberikan kesan melangsingkan. Namun, mengenakan pakaian serba hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki berisiko membuat penampilan terlihat datar, monoton, atau bahkan terlalu suram.

Padahal, dengan trik padu padan yang tepat, outfit monokrom gelap ini justru bisa disulap menjadi sebuah pernyataan gaya yang sangat modis, elegan, dan mencuri perhatian tanpa terkesan berlebihan. Tren ini terbukti tetap kokoh di panggung mode dunia. Data dari Fashion United menunjukkan bahwa lebih dari 30% koleksi musim gugur dan musim dingin di berbagai pekan mode dunia tetap didominasi oleh palet hitam, menjadikannya warna legendaris yang tidak pernah benar-benar keluar dari perputaran zaman.

Pilihan Kain

Kunci utama untuk menghidupkan outfit serba hitam terletak pada permainan dimensi dan tekstur. Ketika semua pakaian memiliki warna yang sama, mata akan fokus pada permukaan bahan yang dikenakan. Menggabungkan beberapa jenis kain dengan karakteristik berbeda dalam satu tampilan--seperti memadukan kelembutan katun dengan kasarnya

denim hitam, atau kilau sutra dengan rajutan tebal (knitwear)--akan menciptakan kontras visual yang kaya.

Teknik Layering

Gaya berlapis-lapis atau layering juga menjadi strategi ampuh untuk membentuk siluet tubuh yang lebih tegas. Memanfaatkan luaran berstruktur seperti blazer formal atau justru rok transparan sebagai lapisan luar dapat memberi dimensi baru pada pakaian hitam agar tidak terlihat kedodoran atau tanpa bentuk. Industri mode global pun mencatat bahwa teknik layering pakaian hitam dengan material ramah lingkungan kini semakin diminati seiring meningkatnya kesadaran akan sustainable fashion.

Perhatikan Detail

Selain mengandalkan tekstur, dinamika visual juga bisa diciptakan melalui detail-detail kecil seperti motif minimalis atau permainan warna yang kontras. Pilihan atasan hitam dengan motif bunga putih kecil atau garis-garis halus dapat memecah kebosanan warna solid. Jika ingin mempertahankan kepekatannya warna hitam pada pakaian utama, sentuhan warna cerah yang kontras pada elemen pendukung seperti tas tangan berwarna merah menyala, sepatu dengan warna neon yang sedang tren, atau bahkan warna kuteks yang mencolok dapat langsung

mencerahkan keseluruhan penampilan.

Fakta menarik dari psikologi mode menyebutkan bahwa menambahkan satu elemen warna kontras pada pakaian gelap mampu meningkatkan fokus visual orang lain hingga dua kali lipat terhadap pemakainya.

Statement Accessories

Tidak kalah penting, aksesoris yang berani (statement accessories) memegang peranan besar sebagai pelengkap akhir. Penggunaan perhiasan yang mencolok, seperti gelang bangle emas berukuran besar, anting-anting geometris, kacamata hitam berbingkai tebal, hingga pemilihan topi dengan warna kontras dapat menjadi pusat perhatian yang mempertegas karakter pemakainya.

Mengenai kekuatan abadi dari gaya monokrom ini, perancang busana legendaris Yohji Yamamoto pernah mengungkapkan sebuah kutipan yang sangat ikonik mengenai esensi dari warna ini. "Warna hitam itu sederhana

sekaligus malas, namun misterius. Pakaian hitam seolah mengatakan kepada orang lain: 'Saya tidak mengganggu Anda, jadi jangan ganggu saya.'"

Melalui perhatian pada setiap detail kecil inilah, pakaian serba hitam yang kerap dianggap sederhana mampu bertransformasi menjadi pilihan gaya yang jauh lebih menarik. Perpaduan potongan busana, tekstur kain, hingga aksesoris yang tepat akan menciptakan tampilan yang dinamis, manis, sekaligus memancarkan

kesan elegan dan berkelas. Dengan sentuhan yang tepat, gaya serba hitam pun dapat dikenakan oleh siapa saja dan tetap terlihat menawan dalam berbagai kesempatan. (farist/dya)



Padu Padan Warna Terbaik dengan Pakaian Hitam

Hitam + Merah Menyala (Bold & Fierce)

Memberikan kontras instan yang kuat, mencerahkan tampilan gelap, dan memberikan kesan berani serta penuh percaya diri.

Hitam + Emas/Aksesoris Metalik (Elegant & Glamour)

Perpaduan sempurna untuk acara formal. Sentuhan emas pada perhiasan atau detail pakaian memberikan kesan mewah dan berkelas.

Hitam + Putih Bersih (Classic Monochrome)

Kombinasi abadi yang tidak pernah salah. Menghasilkan gaya minimalis, bersih, profesional, sekaligus sangat tajam.



Ironi Keroposnya Investasi...dari Hal 1

Ambisi ekspansi global yang selama ini dipromosikan sebagai bukti kematangan industri digital Indonesia kini justru menyingkap sisi lain yang mengkhawatirkan. Langkah startup akuakultur eFishery menembus pasar Malaysia, yang semula dipandang sebagai kisah sukses perusahaan teknologi nasional di kancah internasional, berubah menjadi skandal regional. Ini setelah mereka tersandung dugaan manipulasi laporan keuangan (premeditated fraud).

Kumpulan Wang Persaraan (KWP), lembaga pengelola dana pensiun pegawai negeri Malaysia, tercatat menanamkan investasi sebesar US\$47,7 juta atau sekitar RM200 juta (setara kurang lebih Rp857 miliar) dalam putaran pendanaan Seri D pada Juli 2023. Kini, investasi tersebut berpotensi mengalami kerugian besar setelah terungkap dugaan rekayasa laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Dugaan manipulasi tersebut bukan hanya berdampak pada KWP, tetapi juga menyeret sejumlah investor institusional internasional yang ikut berinvestasi, seperti Temasek, SoftBank, Northstar, dan 42X Fund. Kasus ini kemudian memasuki babak hukum setelah salah satu pendiri eFishery, Gibran Huzaifah, divonis sembilan tahun penjara oleh pengadilan di Bandung atas perkara penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam jawaban tertulis di Parlemen Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan investasi KWP dilakukan melalui proses independent due diligence dan penilaian tata kelola berdasarkan informasi yang tersedia saat itu, termasuk laporan keuangan yang telah diverifikasi auditor internasional.

"Namun, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan pihak internal perusahaan membuat investor tidak dapat mendeteksi penyimpangan tersebut pada tahap investasi. Konsorsium investor kini menempuh berbagai langkah hukum guna mengupayakan pemulihan aset sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan investasi mereka," dikutip dari jawaban tertulis tersebut.

Bahkan menurut Anwar, "investasi eFishery merupakan penipuan yang telah direncanakan (premeditated fraud)" karena manajemen perusahaan memanipulasi laporan keuangan sehingga menyesatkan para investor

Fakta ini tidak dapat dipandang semata sebagai kegagalan satu investor melakukan uji tuntas. Sebaliknya, kasus tersebut memperlihatkan bagaimana manipulasi informasi korporasi mampu menembus berbagai lapis pengawasan yang lazim digunakan investor institusional global.

Likuiditas Pos Indonesia Tertekan

Di saat dana pensiun Malaysia menghadapi potensi kerugian besar akibat investasi pada perusahaan rintisan Indonesia, salah satu badan usaha milik negara yang menjadi tulang punggung layanan logistik nasional, PT Pos Indonesia (Persero), justru menghadapi tekanan likuiditas hingga gagal memenuhi kewajiban membayar sukuknya.

Krisis likuiditas Pos Indonesia mencuat setelah perseroan tidak dapat membayar cicilan imbalan ijarah atau distribusi periodik ke-6 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri A, B, dan C yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026. Nilai kewajiban yang belum terpenuhi mencapai Rp24,11 miliar.

Menyusul kegagalan pembayaran tersebut, Fitch Ratings Indonesia memangkas Peringkat Nasional Jangka Panjang dan peringkat utang senior tanpa jaminan Pos Indonesia menjadi 'C(idn)' dari sebelumnya 'A(idn)'. Fitch juga menurunkan Standalone Credit Profile (SCP) perusahaan menjadi 'c(idn)', yang mencerminkan meningkatnya risiko gagal bayar atas kewajiban finansial perseroan.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen Pos Indonesia menyatakan kegagalan pembayaran tersebut disebabkan kondisi kas perusahaan yang belum memungkinkan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Perseroan telah mengajukan penundaan pembayaran kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan memanfaatkan masa tenggang selama 14 hari sebagaimana diatur dalam dokumen penerbitan sukuk.

Tekanan terhadap Pos Indonesia juga belum sepenuhnya berakhir. Menurut Fitch, kegagalan memenuhi kewajiban tersebut membuat BUMN Logistik ini memasuki masa tenggang (grace period) selama 14 hari kerja. Apabila pembayaran tidak diselesaikan dalam periode tersebut, peringkat perusahaan akan kembali diturunkan menjadi Restricted Default (RD), sedangkan peringkat surat utangnya turun menjadi D.

"Peringkat 'C' mencerminkan bahwa gagal bayar suatu instrumen sudah dekat menurut definisi peringkat Fitch," tulis lembaga pemeringkat tersebut.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar penurunan kualitas kredit, melainkan telah memasuki fase yang sangat dekat dengan kondisi gagal bayar secara penuh.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan hasil asesmen menunjukkan kompleksitas persoalan yang dihadapi Pos Indonesia memerlukan transformasi fundamental dengan kepemimpinan baru.

Lebih jauh, Danantara mengungkap adanya indikasi penyimpangan yang kini sedang ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi.

"Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Rohan.

Menurut Danantara, seluruh temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai prosedur profesional dan ketentuan hukum yang berlaku. Holding BUMN itu juga tengah menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan restrukturisasi Pos Indonesia yang menjadi salah satu perusahaan jangkar dalam Holding BUMN Logistik.

Namun, Pos Indonesia menyatakan penurunan peringkat oleh Fitch tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha perseroan. Perusahaan menegaskan peringkat kredit merupakan opini independen lembaga pemeringkat berdasarkan analisis atas profil kredit perusahaan.

Dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan pada Juli 2026 tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan iklim investasi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besarnya arus modal, tetapi juga kualitas tata kelola perusahaan dan kesehatan keuangan korporasi. Kasus eFishery memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas tata kelola perusahaan dan mekanisme perlindungan investor di sektor digital. Sementara itu, gagal bayar Pos Indonesia menunjukkan bahwa tekanan likuiditas juga dapat menghantam perusahaan milik negara yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. (wid,ktn,kum,ist/dya)

Lanjutan dari Hal 1....

DAMPAK LANGSUNG & KONSEKUENSI PASAR

Pemotongan Peringkat Kredit:

- Lembaga pemeringkat Fitch Ratings memotong Peringkat Nasional Jangka Panjang dari A(idn) ke C(idn).
- Peringkat utang senior tanpa jaminan dan program sukuk senilai maksimal Rp 1,5 triliun juga jatuh ke level C(idn).
- Peringkat C ini menandakan bahwa status gagal bayar total (default) sudah di ambang mata.

Pembekuan Dana Investor:

- Pihak KSEI terpaksa resmi menunda distribusi pembayaran imbal hasil kepada seluruh pemegang sukuk.

Gejolak Manajemen:

- Krisis ini bertepatan dengan mundurnya Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, yang menyinkronkan tekanan internal perusahaan

IKHTISAR KRISIS GAGAL BAYAR POS INDONESIA (JULI 2026)

Instrumen Utang

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri A-C ke-6

Pemicu Utama

- Arus kas (cash flow) seret & tekanan likuiditas

Peringkat Fitch

- Dipangkas drastis dari A(idn) menjadi C(idn)

Status Saat Ini

- Masa tenggang kontraktual (grace period) 14 hari kerja

Nilai Gagal Bayar

Rp 24,11 Miliar

Tanggal Jatuh Tempo

7 Juli 2026

**POS
IND**
Logistik Indonesia



RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD JATIM 2025 DISAHKAN, BERIKUT CATATAN DPRD

SURABAYA– DPRD Jawa Timur (Jatim) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (14/7/2026). Meski seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda tersebut, ada sejumlah catatan agar pengelolaan APBD ke depan tidak lagi sekadar mengejar tingginya serapan anggaran. Tetapi mampu menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mengungkapkan, keberhasilan pemerintah provinsi dalam merealisasikan pendapatan daerah di atas target merupakan capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, menurutnya, indikator keberhasilan APBD tidak cukup hanya diukur dari besarnya pendapatan maupun tingginya realisasi belanja.

“Capaian pendapatan daerah yang melampaui target tentu patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan APBD benar-benar berkualitas, yakni anggaran yang terserap secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Deni, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Setiap program yang dibiayai melalui APBD perlu diukur berdasarkan hasil yang dicapai, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu fraksi yang secara khusus menyoroti efektivitas belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan. Juru bicara PAN, M. Aziz, menilai tingginya realisasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Misalnya pada sektor pendidikan, realisasi anggaran mencapai 92,88 persen. Namun, indikator kualitas pendidikan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas masih belum mendapatkan perhatian yang maksimal. Capaian literasi dan numerasi masih rendah,” ujar Aziz.



Wakil ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono saat menandatangani persetujuan penerimaan pertanggungjawaban APBD Jatim Tahun 2025

Ia menjelaskan, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Jawa Timur masih berada pada angka 13,44 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 8,39 tahun.

“Fakta ini menunjukkan bahwa besarnya belanja pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Pada sektor kesehatan, PAN juga menilai tingginya realisasi belanja belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Aziz, realisasi belanja Dinas Kesehatan memang telah mencapai 91,49 persen, tetapi berbagai persoalan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

“Penyakit menular terus meningkat seperti TBC dan HIV/AIDS, penurunan stunting belum optimal, pengendalian tuberkulosis masih memerlukan penguatan dan Program Cek Kesehatan Gratis hingga akhir tahun 2025 baru menjangkau sekitar

12,69 juta penduduk atau sekitar 30 persen dari total sasaran,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi PAN meminta penyusunan APBD tidak lagi hanya mengejar tingginya realisasi belanja.

“APBD tidak boleh berhenti pada output berupa pembangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan pelatihan, melainkan harus menghasilkan outcome berupa meningkatnya kualitas pendidikan, membaiknya derajat kesehatan, berkurangnya kemiskinan, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Senas dengan hal tersebut, Juru bicara Fraksi PDI DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, mengatakan tantangan pembangunan Jawa Timur kini tidak lagi terletak pada kemampuan mengelola anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut mampu menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas.

“Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan Jawa Timur tidak lagi

semata-mata berada pada kemampuan mengelola anggaran, tetapi pada kemampuan mengubah anggaran menjadi hasil pembangunan yang lebih berkualitas,” katanya.

Menurut Guntur, pendekatan evaluasi yang dilakukan Komisi E DPRD Jawa Timur patut diapresiasi karena mulai menggeser fokus pembahasan dari sekadar tingkat penyerapan anggaran menuju manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Pendekatan tersebut memperkaya proses pembahasan karena menggeser fokus evaluasi dari sekadar tingkat serapan anggaran menuju manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem juga menilai paradigma pengelolaan keuangan daerah perlu bergeser menuju penganggaran berbasis hasil. Melalui juru bicaranya partai, Deni Prasetya, menegaskan keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan.

“Paradigma pengelolaan keuangan daerah saat ini harus bergeser menuju penganggaran yang berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), di mana keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran mampu dibelanjakan, tetapi sejauh mana belanja tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.

Ia menambahkan setiap rupiah APBD merupakan amanah masyarakat yang harus dikonversi menjadi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, dan perlindungan sosial. (adv/pra/dya)



Juru Bicara PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono



Juru Bicara PAN DPRD Jatim, M. Aziz



Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Jatim, Deni Prasetya